

Post-Truth, Cyber Identity dan Defisit Demokrasi

(Wacana Lacanian atas Kecenderungan - Problematika Identitas dan Konsolidasi Demokrasi dalam Masyarakat Informasi Indonesia)

AG. Eka Wenats Wuryanta
Departemen Ilmu Komunikasi Universitas Paramadina Jakarta
eka.wenats@paramadina.ac.id

ABSTRAK

Kehadiran Media Sosial di era Globalisasi memfasilitasi masyarakat demokratis dalam menyuarakan aspirasi mereka di ruang publik baru. Globalisasi melalui media kemudian mendorong orang-orang yang pada awalnya berinteraksi secara konvensional di *public-sphere*, mulai terhubung di dunia maya atau dunia maya. Keberadaan dunia maya mampu membentuk netizen untuk memberikan opininya sebagai manifestasi dalam demokratisasi di media sosial seperti memberi opini publik untuk membentuk politik informasi sehingga mendorong terciptanya publisitas. Namun, munculnya *cyberdemocracy* tidak berbanding lurus dengan manfaat yang ditunjukkan dalam teori hasrat Lacanian. Hal ini terbukti persoalan kebebasan individu, kebebasan berpendapat dan berekspresi yang tidak rasional di media sosial hanya menampilkan wacana kebencian dan *echo chambers*. Dalam hal ini, kerangka analisis Jacques Lacan menjadi metode untuk membedah fenomena tersebut. Akibatnya, pemenuhan hasrat adalah yang menjadi utama daripada partisipasi demokrasi politik. Inilah kemudian memunculkan isu pasca-kebezaan dan defisit demokrasi yang tanpa disadari mereduksi nilai-nilai demokrasi itu sendiri.

Keywords : Cyberdemokrasi, Identitas, hasrat, Public Sphere, Echo Chambers, Post-Truth

Pengantar

Hadirnya ruang publik baru di era globalisasi yang dikenal dengan internet melalui media sosialnya juga melahirkan kebiasaan dan nilai baru yang merupakan bagian penting dalam masyarakat demokrasi. Di sisi lain, publik semakin mudah melakukan akses informasi apapun dari media dengan bantuan internet. Mereka tidak perlu menunggu berita yang sedang terjadi pada keesokan hari dalam surat kabar, dengan internet kejadian yang baru terjadi beberapa jam yang lalu dapat langsung dilihat di media online.

Menurut Jenkins dan Thorburn dalam bukunya *Democracy and New Media* (2004: 8-11) media sosial membentuk medan baru dalam relasi-relasi sosial. Dimulai dari terbentuknya *cyberspace*, lalu membentuk *cyberculture*, dan *cyber democracy*. Percakapan publik dalam media sosial tumbuh yang akhirnya menjadi indikator partisipasi politik dalam konteks sosial. Media sosial ini akan membuat perubahan menyangkut berbagai aspek kehidupan masyarakat seperti perubahan kultur media, ekonomi sampai kepada bentuk pemerintahan serta aliansi politik.

Dalam buku yang sama mengutip pendapat Ithiel de Sola Pool media sosial adalah teknologi untuk memajukan kebebasan. Munculnya media sosial berpotensi membawa pengaruh politik karena berbagai kekuatan sosial, ekonomi, dan kultural akan membentuk ruang-ruang publik menjadi terbuka. Ada semacam pandangan bahwa dalam cyberspace dapat berubah menjadi civic cyberspace. Asumsi ini berkembang karena penggunaan media sosial dapat memunculkan peran baru bagi para penggunanya untuk langsung menjadi netizen. Yaitu sebuah kewarganegaraan yang aktif dan partisipatif untuk terlibat dalam proses-proses sosial bahkan politik.

Belakangan ini di berbagai pemberitaan media massa bahkan yang kita temui di cyberspace marak mengangkat tentang konflik dan kekerasan. Sumber berita dalam kasus konflik ini sangat beragam. Mulai dari konflik internasional, konflik horizontal, konflik yang bersifat politis, hingga persoalan yang bersifat domestik, semuanya menjadi bahan pemberitaan yang mampu menyedot perhatian masyarakat.

Perbedaan pendapat yang pada awalnya hanya berkisar dalam persoalan pilihan politik kemudian melebar menyinggung isu-isu lainnya, termasuk isu sara dan ideologi. Buntutnya, mulai terjadi segregasi di tengah-tengah masyarakat. Istilah “kami” dan “mereka” dalam konotasi yang negatif pun menjamur di sejumlah media sosial, khususnya Facebook atau twitter. Dalam sudut pandang ini, penulis ingin menggambarkan fenomena cyber demokrasi di Indonesia dalam hadirnya new public sphere (konsep Jürgen Habermas) di media sosial. Kehadiran new media ini diharapkan mampu memberikan ruang baru demokrasi bagi rakyat untuk menyatakan pendapatnya secara bebas sekaligus mengawasi jalannya situasi politik dan pemerintahan. Pendapat itu didukung oleh Castells dalam bukunya *Informational Politics and the Crisis of Democracy* (1997: 367) yang menyatakan bahwa cyberspace merupakan wadah baru bagi masyarakat untuk menciptakan perubahan politik, menghindari terjadinya konflik antara pasar bebas dan pasar tertutup, serta untuk mengatasi perpecahan karena jarak antara masyarakat yang inklusif dan eksklusif. Ruang ini tidak lain merupakan hasil dari transformasi teknologi yang ada.

Dalam konteks faktual terjadi kontradiksi. Munculnya dikotomi antara ruang baru demokratisasi sebagai angin segar kebebasan berekspresi yang dulunya media massa dikekang, kini maraknya kasus penyebaran berita hoax oleh oknum-oknum buzzer pada lingkaran cyber demokrasi di media sosial, penyebaran hoax, caci maki, serang fitnah yang dimainkan emosi sehingga mengesampingkan orang dalam menerima fakta dan objektif realita sesungguhnya mengacaukan proses demokratisasi di Indonesia. Dalam perspektif Jacques Lacan, tindakan subjek dalam konteks sempitnya adalah partisipasi demokrasi dilihat sebagai bentuk usaha untuk memenuhi

hasratnya. Akibatnya, pemenuhan hasrat menjadi utama, daripada tindakan partisipasi tersebut. Untuk memperoleh hasrat ini, subyek tidak perlu benar-benar berpartisipasi, ia cukup hanya perlu merasakan sensasi berpartisipasi. Partisipasi demokrasi yang kelihatan nyata tapi tidak ada yang terjadi secara kongkret.

Ini pun memberikan alasan bahwa akhir-akhir ini munculnya post truth dimana orang cenderung tidak mencari kebenaran melainkan sesuatu yang cocok dengan keyakinan dan perasaan meskipun itu salah dan defisit demokrasi yang mengaburkan esensi-esensi dari demokrasi itu. Jalan Demokratisasi ini juga selain memicu konflik yang banyak terjadi di media sosial, juga diperparah dengan lahirnya polarisasi adalah karena perbedaan pendapat dalam menyikapi kontes Pilkada Serentak tahun 2017 kemarin, khususnya pada Pilkada DKI Jakarta. Ancaman ini pun di cemasakan rakyat Indonesia yang heterogen disebabkan konflik tersebut di pakai kembali dalam Pilkada tahun 2018 nanti.

Ketika saat ini media baru dianggap sebagai ruang publik baru dalam berdemokrasi yang merefleksikan kenyataan, maka dapat dikatakan bahwa wajah dari masyarakat Indonesia adalah wajah yang penuh dengan konflik dan kekerasan. Konflik merupakan fenomena yang hadir dalam keseharian masyarakat Indonesia, setidaknya itulah yang ditampilkan oleh media saat ini. Paper ini mau mencoba merefleksikan pola dan kecenderungan isu demokrasi, media dan politik informasi yang berlangsung. Seberapa jauh masalah system politik berhubungan dengan masalah identitas individu? Dan sejauh mana konsep Lacan mampu merefleksikan politik informasi dan konsolidasi politik berikut demokratisasi yang berlangsung dinamis pada masyarakat Indonesia modern? Bagaimana konsolidasi demokrasi berlangsung dengan kondisi sosial dan system politik yang masih harus dikembangkan secara rasional.

Diskursus 1: Identitas Politik Indonesia dalam Perspektif Jacques Lacan

Tulisan ini memakai konsep 'identitas hasrat' ini ke dalam bentuk yang operasional. Perspektif ini dimulai dengan Mark Bracher and Lacan 1993 dalam bukunya *Discourse, and Social Change: A Psychoanalytic Cultural Criticism*. Pintu masuk Bracher untuk operasionalisasi ini adalah definisi utama dari Lacan (1996: 43) sendiri tentang hasrat, yaitu bahwa hasrat adalah selalu "hasrat akan yang lain" ("*desire finds its meaning in the desire of the other*").

Frase "hasrat akan yang lain" ini mengandaikan tiga makna bias. Ambiguitas ini menunjuk pada tiga landasan pembedaan hasrat. Landasan pertama, kata "hasrat" bisa merupakan hasrat untuk menjadi dan bisa juga hasrat untuk memiliki. Pembedaan ini sesuai dengan terminologi libido narsistik dan libido analitik oleh Freud dalam bukunya *The Standard Edition of the Complete Psychological Works of Sigmund Freud* (1953: 76-89). Kedua, kata "akan," menunjukan bahwa subjek hasrat tersebut bisa menjadi subjek aktif (yang punya hasrat) dan objek pasif (yang menjadi objek hasrat). Terakhir, kata "yang lain" inilah yang merupakan identitas objek hasrat. Mengacu ke penjelasan Lacan, identitas hasrat ditempatkan pada tiga ranah yang saling berhubungan, yaitu: ranah imajiner dan ranah simbolik.

Jika menggunakan refleksi diagnostik Lacan, maka terdapat dua ragam manusia politik pasca Orba. Dua ragam manusia politik itu disebut sebagai, manusia histeria dan manusia obsesif. Dua ragam termasuk dalam tahap kompulsif. Dalam tahun-tahun politik ini, mereka berkumpul bersama, penuh sesak, mengikuti perayaan demokrasi. Dua ragam manusia bisa ditemui di dunia nyata dan dunia maya. Dua ragam manusia tersebut saling mengharap, saling minta dukungan dan kerja sama, dalam ketulusan sekaligus kebohongan yang telah menjadi rahasia bersama. Bagi Lacan, dua kondisi kejiwaan ini disebabkan oleh masalah kronis yang sama, yakni, fantasi kekuasaan yang berpusat pada sang tokoh, yang bisa diberi nama dan wajah siapa pun. Saking

kosongnya sosok pemimpin ini, oleh Lacan disebut *big other*, kedua makhluk politik tersebut berusaha mengisi sosok sakral ini, menggarap dan membentuknya, dengan dua cara yang sama sekali berbeda.

Manusia politik pertama adalah manusia histeria. Manusia ini biasa disebut dengan rakyat, manusia-manusia ini datang dari berbagai latar belakang agama, suku, kelas ekonomi, golongan sosial. Mereka bersatu dalam satu jenis sikap dan tindakan: menyerahkan kedaulatan diri sepenuhnya kepada sang pemimpin. Kesuksesan dan kejatuhan sang pemimpin dirasa sebagai kemuliaan dan kehinaan diri mereka sendiri. Tanpa kehadiran sang pemimpin yang dipuja-puji itu, politik dianggap tak berguna dan demokrasi sedang krisis. Pada titik tertentu -bagi mereka, krisis demokrasi berarti krisis kepemimpinan, sebuah ketidakhadiran tokoh idola. Sang pemimpin diberhalakan sedemikian rupa dalam rangka melayani fantasi bernegara sebagai jalan menuju surga dan menistakan bangsa-bangsa lain. Konsolidasi dan mobilisasi manusia jenis ini merupakan prasyarat mutlak menuju dua masa depan politik nasional yang sama-sama berbahaya yaitu teokrasi dan fasisme.

Politik histeria memicu nafsu berkuasa bagi mereka yang terpelajar. Mereka merasa bisa memenuhi fantasi histeria rakyat ini. Mereka paham rakyat yang histeria membutuhkan pemimpin sebagai model. Model dalam pengertian model harta, jabatan, genealogi fisik dan belas kasih moral. Dalam panggung politik, mereka tidak sekedar mencitrakan diri tapi juga dicitrakan sesuai kehendak histeria massa. Bakal pemimpin ini selalu tersedia. Wajah lama dan wajah baru tak ada bedanya karena mereka selalu datang dari kasta politik dan kelas ekonomi yang relatif sama. Namanya oligarki, warisan sejarah politik nasional dari masa ke masa. Dalam histeria massa, mereka tak perlu bekerja keras untuk menjadi cerdas dan dekat dengan rakyat. Diri mereka adalah bentuk materialisasi fisik dari sebuah fantasi histeria.

Manusia politik kedua adalah makhluk obsesif-kompulsif. Berbeda dari histeria, manusia jenis ini tidak menyerahkan kedaulatan kepada sang pemimpin. Mereka menokohkan sang pemimpin agar mereka sendiri kelak menjadi pemimpin. Tidak hanya pandai, mereka sangat cerdik. Keinginan berkuasa disembunyikan di lubuk hati sambil memperlihatkan kesetiaan yang dibuat-buat kepada sang tokoh. Sang tokoh berpuas diri setelah berhasil menjadi pemimpin tetapi bagi kaum obsesif ini dirasa sebagai kepuasan sementara sampai nanti tiba saatnya membongkar kuasa politik penguasa. Mereka berasal dari oligarki dan juga dari kelas politik pemula yang ingin segera berada dalam lingkaran istimewa tersebut.

Jumlah mereka tak banyak dan kita mudah menjumpai manusia jenis ini di sekitar sang pemimpin dan bakal pemimpin. Habitat mereka di sekitar dan di dalam istana, pengurus partai politik, intelektual partisan, dan para pengusaha, yang semuanya mencari peruntungan nasib sebagai kroni negara, kelompok pemenangan oligarki. Mereka bekerja secara terbuka dan tak sedikit yang bermain di belakang layar. Satu hal yang pasti, mereka sangat tahu tentang cara kerja kekuasaan, sangat paham kelebihan dan kelemahan sang pemimpin. Seluruh rahasia politik ada di tangan mereka. Itu juga sebabnya, ketika berkuasa pemimpin lebih mempunyai kekuatiran dan takut dengan kelompok ini daripada menghabiskan waktu mendekati diri dengan rakyat. Sejarah oligarki politik Indonesia penuh sesak dengan makhluk jenis ini. Itu juga sebabnya system politik selalu disuguhkan dengan rangkaian drama politik yang unik dan berbeda yaitu: kudeta kasar dan halus, konflik internal partai politik, koalisi tanpa ideologi, dan saling sandera dalam penanganan korupsi dan sebagainya.

Jika demokrasi harus dilaksanakan dengan nalar rasional, maka situasi demokrasi kita sedang berada dalam kondisi gawat-darurat. Tidak cukup saja dengan memuliakan rakyat dan

menistakan pemimpin. Dibutuhkan dekonstruksi mental agar jiwa politik kembali kritis dan revolusioner.

Diskursus 2: Politik Informasi, Post Truth dan Media

Wacana tentang *informational politics* atau politik informasi, tentu akan sangat berhubungan dengan kehadiran media teknologi informasi di era kontemporer. Manuel Castells (1997: 311) dalam artikel yang berjudul *Informational Politics and the Crisis of Democracy* berpendapat bahwa era baru teknologi informasi telah memasukkan berbagai aturan baru dalam konteks transformasi sosial budaya, yang secara signifikan berpengaruh pada substansi politik. Informasi dan komunikasi politik pada dasarnya berada dalam ruang lingkup media elektronik dengan berbagai pesan yang dibawa, hingga interaksi antara media dan penonton mereka disebut sebagai interaksi dua arah. Terdapat hal menarik dalam media elektronik seperti TV, radio, televisi, dan internet yang telah menjadi ruang khusus dalam urusan politik. Hal ini bukan berarti menunjukkan bahwa seluruh urusan politik dapat direduksi menjadi gambar, teks dan suara untuk kemudian dikomunikasikan melalui media, namun tanpa media tidak akan ada kesempatan untuk memenangkan atau mengolah kekuatan. Tanpa kehadiran media, proposal atau kandidat politik tidak memiliki kesempatan untuk memperoleh dukungan secara luas. Politik secara tidak langsung telah terbingkai dalam hal substansi, organisasi, proses dan kepemimpinan, dengan logika yang melekat pada sistem media terutama media elektronik. Proses ini tidak hanya berdampak pada pemilihan umum, namun juga organisasi politik, pengambilan keputusan dan pemerintahan.

Media sebagai sumber berita yang kredibel mampu menjelaskan mengenai bagaimana media telah menjadi bagian dalam ruang politik (Castells, 1997: 322). Apabila pengambil keputusan berniat untuk menyajikan programnya, mereka hanya butuh menyampaikan pesan melalui media. Di dunia yang semakin jenuh dengan informasi, pesan yang paling efektif adalah pesan yang paling sederhana dan disajikan dalam secara dikotomis atau bersifat bipolar, yakni baik dan buruk. Oleh karena itu, media berita harus berkonsentrasi pada pesan-pesan negatif untuk dapat mempengaruhi pendapat politik dan personalisasi peristiwa. Hubungan menarik lain antara media dengan politik dapat ditemukan dalam *politics of scandal* atau *politics of libido* (dalam istilah Lacan). Castells (1997: 333) menyatakan di satu sisi media menjadi dasar bagi perebutan kekuasaan, namun di sisi lain politik media menjadi operasi kelembagaan yang semakin mahal. Dari sini para aktor dituntut untuk mencari dukungan finansial bahkan hingga melewati batas hukum demi menutupi biaya yang diperlukan. Hal ini yang menjadikan tindak korupsi semakin meluas. Penggunaan dan penyalahgunaan kekuasaan untuk kepentingan pribadi seakan menjadi fitur khas bagi politik informasi (Castells: 1997: 341).

Konstruksi ulang demokrasi dan pengembangan politik informasi cenderung menuju pertumbuhan fragmentasi sistem politik (pembelahan framen unsur politik). Fragmentasi ini merupakan akibat dari system politik partai yang bersifat dikotomistik. Di satu pihak terjadi lokalisasi dan lokalisme, tapi di sisi yang lain terjadi referendum dan dukungan politik personal. Menurut Castells (1997: 349), terdapat tiga kecenderungan bagi perkembangan politik informasi. Pertama, rekonstruksi negara lokal dengan meningkatnya partisipasi politik warga pada pemerintah daerah dengan *support* keberadaan teknologi informasi. Kedua, penggunaan teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan politik dan komunikasi horizontal antar masyarakat, serta pemberdayaan antar kelompok masyarakat. Akses informasi online dan komunikasi melalui komputer memberikan fasilitas difusi dan pengambilan informasi, serta menawarkan kemungkinan debat dan interaksi dalam forum elektronik melalui kontrol media.

Lebih utama, masyarakat melakukan pembentukan konstelasi politik dan ideologi, menghindari struktur politik yang telah ada sehingga menciptakan lapangan politik yang lebih fleksibel (Castells, 1997: 349). Ketiga, pengembangan dinamis mobilisasi politik di sekitar isu non-politik seperti isu kemanusiaan, feminisme atau isu-isu lingkungan. Hal ini dilakukan dengan memperkenalkan proses politik dan isu-isu politik baru, sehingga memajukan krisis demokrasi liberal klasik sementara mendorong munculnya demokrasi informasi.

Bagaimana hal di atas dielaborasi dengan masalah pasca-kebenaran informasi? Andrey Miroshnichenko menjelaskan bahwa menurut Oxford, “pasca-kebenaran” menggambarkan “keadaan di mana fakta objektif kurang berpengaruh dalam membentuk opini dibandingkan daya tarik emosi dan keyakinan personal.” Pada 2016, kata ini digunakan hampir sebagian besar dalam hubungannya dengan referendum Inggris Raya untuk meninggalkan Uni Eropa dan pilpres AS. Dalam kedua kasus tersebut, fakta faktual, pengetahuan rasional, dan pengecekan tidak berguna apa-apa. Jurnalisme yang mengutamakan akuntabilitas dengan standar mutu, kode etik dan keterikatan kepada fakta telah berubah atau bahkan dapat dikatakan hilang. Narasi menghilangkan kepercayaan atau kredibilitas. Buruknya, keseluruhan ide tentang kebenaran menjadi kabur bahkan tidak bermakna.

Mobilisasi hal-hal bombastis yang tidak didukung oleh data faktual menjadi urusan politisi atau lembaga pemikir (*think-tank*) mereka ketika berkampanye melalui media arus utama (baik cetak, radio, maupun televisi), media online, dan atau media sosial. Ciri penting politik pasca-kebenaran adalah (a) mengaduk-aduk masyarakat dengan hal-hal yang bersifat emosional, (b) abai terhadap data dan fakta, (c) mengutamakan dan menyebarkan berita yang belum tentu kebenarannya atau palsu, (d) menggabungkan gerakan populis dengan teori-teori konspirasi yang jauh dari pembuktian ilmiah, (e) mobilisasi narasi fiktif tentang figur atau peristiwa tertentu, dan (f) memoles ketidakjujuran dalam membuat opini publik untuk memperkuat posisi sosial figur, kelompok, atau kepentingan tertentu dalam masyarakat yang semakin terbiasa dalam peradaban audio visual dan online.

Secara historis, kondisi pasca-kebenaran memang menyisakan perdebatan, khususnya terkait kebenaran itu sendiri. Dalam dunia posmodern, misalnya, kebenaran tidak bisa lagi diukur berdasarkan pendapat pakar atau kelompok tertentu. Kebenaran adalah sesuatu yang bersifat relatif dan subjektif karena kebenaran sebagaimana digambarkan oleh modernisme adalah sesuatu yang sejak kelahirannya bersifat berorientasi kebarat-baratan. Cara pandang posmodern adalah hal yang membuka tabir terkait kasus Brexit dan Trump. Grace Russo Bullaro mengatakan bahwa orang-orang yang berada dalam dua faksi politik tersebut lebih suka berbicara dari posisi posmodernis yang berhubungan dengan isu subjektivitas. Makna adalah bahwa mereka memiliki opini mereka sendiri, tanpa memiliki sumber fakta karena mereka tidak percaya lagi kepada fakta atau kebenaran, selain karena fakta-fakta dan kebenaran-kebenaran versi mereka. Bagi mereka, kebenaran mereka sendiri lebih benar daripada segala hal yang dikabarkan sebagai fakta. Meskipun kebenaran memang bersifat relatif, tetapi mengabaikan kebenaran dengan mengaburkannya dengan fiksi, imajinasi dan narasi emosional menjadi bahaya tersendiri karena hal itu akan menciptakan individu atau kelompok yang mudah sekali disulut untuk membela kepentingan tertentu ketika ada mobilisasi informasi yang menyentuh atau menyulut emosi publik. Padahal mobilisasi tersebut belum tentu tahu dan paham dengan kebenarannya, tetapi biasanya menyinggung identitas atau keyakinan tertentu yang dianut kelompok sasaran kampanye informasi sepihak.

Berkembangnya politik pasca-kebenaran juga tidak bisa dilepaskan dari kegagalan institusi atau organisasi politik dalam mempengaruhi publik tentang permasalahan tertentu yang

sedang menjadi isu-isu besar dalam masyarakat. Kondisi inilah yang menurut Paul Cho menjadikan politik desas-desus atau rumpi-rumpi ala pasca-kebenaran menjadi biasa. Lebih jauh Cho menjelaskan, para politisi pasca-kebenaran mengisi kurangnya kepercayaan publik dengan menuduh analisis kompleks dan mendalam yang dilakukan para pakar sebagai sihir yang ditujukan untuk membuat rakyat atau masyarakat menjadi bingung. Kemampuan para politisi pasca-kebenaran sebenarnya juga jalin-kelindan dengan hasrat manusia untuk mencari pandangan yang sesuai dengan pandangan mereka. Hal itu kemudian mengambilnya untuk mendukung bias yang sudah ada sebelumnya. Media yang sedari awal tidak ingin kehilangan rezeki ekonomi, tidak berani mengambil risiko untuk kehilangan para pelanggannya. Kondisi tersebut menjadikan para politisi pasca-kebenaran mendapatkan keuntungan untuk selalu muncul di depan publik melalui pemberitaan sembari menghindari pihak-pihak yang sejatinya memiliki pandangan “yang lebih bisa dipercaya.” Akibatnya, para politisi yang kontra dengan para demagog tersebut bisa mendapati usaha mereka berantakan karena efek umpan balik yang kontradiktif, sebuah kondisi di mana individu-individu yang menerima informasi yang kurang mengesankan tidak serta-merta mau melawan pandangan mereka. Penyebarluasan pasca-kebenaran dan politisasinya sangat terbantu oleh teknologi terbaru, tak terkecuali media televisi, media internet, ataupun media sosial.

Refleksi Kritis: Post Truth dan Defisit Demokrasi Di Indonesia Dalam Kebebasan Individu Di Era Cyber Democracy

Fenomena di Indonesia menunjukkan bahwa dalam menilai demokrasi, masyarakat hanya dilibatkan dalam partisipasi politik sebatas keterlibatan mereka di dalam pemilihan umum atau pemilihan kepala daerah saja.

Di dalam demokrasi di negara yang mapan, election itu boleh. Sistem ini juga untuk memastikan check and balances terjadi, kalau prosedur demokrasi itu berjalan dengan baik. Namun ketika penggantian kekuasaan itu terjadi anarki, kekerasan, saling membunuh maka demokrasi itu sebenarnya belum berjalan, itu pun yang terjadi sekarang ini dengan maraknya kasus irasionalitas masyarakat di dalam cyberdemocracy di media sosial.

Di Indonesia demokrasi kita secara prosedur baik, tapi tidak baiknya secara esensi. Partisipasi *high politics*, namun secara kausal partai juga gagal dalam melakukan pendidikan politik bagi warga negara, padahal ia merupakan kristalisasi dari aspirasi rakyat. Di sinilah timbul gap lebar antara masyarakat dengan elit politik sehingga komunikasi politik yang ada menjadi sangat minim. Masyarakat menjadi kebingungan di dalam memikirkan bagaimana caranya agar suara dan aspirasi mereka didengar atau setidaknya dapat tersalurkan ke ranah publik. Masyarakat butuh medium yang mana kepentingan politik mereka mendapatkan tempat untuk menjadi diskursus. Untuk itu masyarakat berupaya mencari saluran komunikasi politiknya.

Kini *landscape* sosial dengan kehadiran media baru di tengah masyarakat Indonesia menghasilkan ruang publik baru menjadi perhatian utama kita pada persoalan kebebasan berekspresi atas apa saja dan berpartisipasi dalam arti akses internet. Awalnya *new public sphere* seperti Facebook, Twitter dan yang baru Instagram dimanfaatkan sebagai ajang merepresentasikan diri manusia sebagai makhluk sosial. Robert Dahl menyatakan bahwa hal yang paling menentukan juga bagi sistem dalam demokrasi adalah bagaimana masyarakat untuk mengimplikasikan hak-hak fundamental seperti adanya kebebasan untuk berekspresi, berkomunikasi, berkumpul, dan berorganisasi, yang dibutuhkan bagi perdebatan politik dan pelaksanaan kampanye-kampanye pemilihan itu. Kini masyarakat di era globalisasi informasi memanfaatkan ruang maya sebagai sarana partisipasi politiknya, istilahnya *cyber democracy*.

Partisipasi politik dalam ruang maya ini dapat dilakukan tanpa kehadiran fisik partisipan atau warga negara.

Bagi kelompok optimis, internet dilihat sebagai ruang siber memuat ruang public baru yang memungkinkan pertukaran melampaui geografi, sosial dan batasan budaya, yakni sebuah tempat tanpa adanya kontrol, sehingga setiap individu bebas untuk mengekspresikan pendapat dan pemikirannya. Derasnya injeksi informasi media sosial ke dalam seluruh sendi-sendi kehidupan masyarakat Indonesia dapat diibaratkan pedang bermata dua. Dalam pandangan kritis, internet sekaligus menciptakan segmentasi publik yang berbeda (*echo chambers*) yang mengakibatkan polarisasi sosial.

Dari hal-hal di atas maka tulisan ini menemukan alasan dengan menggunakan teori psikoanalisis Jacques Lacan. Teori ini melihat perilaku subyek, dalam hal ini, partisipasi demokrasi sebagai sebetulnya upaya untuk memenuhi hasratnya. Akibatnya, pemenuhan hasratlah yang menjadi utama, ketimbang tindakan partisipasi tersebut. Untuk memperoleh hasrat ini, subyek tidak perlu benar-benar berpartisipasi, individu cukup hanya perlu merasakan sensasi berpartisipasi. Sensasi inilah yang sebenarnya individu cari dengan melakukan tindakan yang ia kira partisipasi demokrasi—nyatanya, tidak ada yang terjadi secara kongkrit di lapangan. Adalah media baru yang mampu mengkondisikan kesalahpahaman perseptual ini, sehingga hal itu mampu menjebak energi-energi partisipasi subyek di dalam sirkuit medianya dengan upaya terus menerus memproduksi sensasi partisipasi demokrasi.

Melalui contoh ini, dapat dilihat bagaimana obyek hasrat harus dilihat setidaknya sebagai dua lapis: identitas dan obyek. 'Identitas hasrat' merupakan motivasi libidinal sang subyek untuk menghasrati obyek hasrat yang mengandung identitas hasrat tersebut. Obyek inilah yang disebut Lacan sebagai 'obyek penyebab hasrat' (*object cause of desire*). Jadi, anatomi hasrat dapat dibedah ke dalam dua aspek: identitas hasrat dan obyek hasrat. Dalam setiap obyek hasrat, dengan demikian, selalu tersimpan identitas-identitas hasrat. Namun demikian yang penting ditekankan adalah bahwa identitas hasrat sebenarnya tidak pernah tersimpan begitu saja dalam obyek hasrat; identitas hasrat dalam obyek hasrat adalah selalu merupakan hasil proyeksi dan investasi dorongan hasrat sang subyek. Artinya, identitas hasrat sebenarnya tidak pernah ada dalam obyek tersebut dengan sendirinya; adalah subyek yang memproyeksikan hasratnya ke obyek tersebut sehingga seolah-olah obyek tersebut memendam suatu harta karun libidinal tertentu.

Catatan penting tidak mungkin ada deliberasi di ruang public baru, Di ruang itu bukan *rational public sphere* justru muncul *echo chambers* (ruang gema) di mana orang pada dasarnya hanya mendengar suaranya sendiri, kelompok itu mendengarkan suaranya sendiri, merasa benar sendiri, dan berputar-putar disitu saja, kalau dalam psikologi sekarang menjadi sangat kolektif yang dinamakan 'confirmatory bias'. Subjek cenderung untuk mengonfirmasi bias-bias, subjek punya kecenderungan untuk bertarung pada konfirmasi yang mendukung kepercayaan dan opini saya. Itu kecenderungan luas. Dengan media sosial, ini yang terjadi adalah justru dilakukan secara kolektif, anda punya *echo chambers* yang tidak ada singgungan sama sekali satu dengan yang lain. Ada paradoks, di satu sisi partisipasi terbentuk dengan teknologi, aksesnya terbuka tapi disisi lain cyberspace itu tidak memungkinkan rasionalitas karena platformnya sampai hari ini tidak memungkinkan munculnya konsep mendengarkan.

Hasil Indeks Demokrasi Indonesia, civil liberty Indonesia adalah tinggi dari semua aspek, kebebasan dari diskriminasi, kebebasan keberagaman. Tapi satu dimensi yang lain dalam civil liberty ini Indonesia rendah yaitu ketika dalam kebebasan terutama yang berkaitan dengan kebebasan berekspresi terutama yang berhubungan dengan isu politik. Ekspresi-ekspresi politik

dari kebebasan sipil tadi banyak mengalami gangguan di Indonesia, walau kebebasan beragama yang sering kali jadi perbincangan, agama yang diboikot. Kebebasan sipil ini kecil namun yang tinggi adalah ancaman penggunaan kekerasan terkait dengan kebebasan berekspresi.

Banyak yang mengatakan demokrasi di Indonesia ini kebablasan, tapi sebetulnya tidak demikian melainkan demokrasi kita ini mengalami defisit. Kebebasan itu tidak bisa dikatakan kebablasan karena kalau kebablasan ada hukum yang mengatur. Defisit demokrasi yang terjadi baik kebebasan, kesejahteraan, keamanan, justice, ini semua belum tersalurkan.

Dari uraian diatas, penulis ingin menyampaikan bahwa terjadinya sebuah defisit demokrasi dalam kebebasan individu terutama di ruang baru publik seperti kehadiran media internet mampu memecah belah persatuan kita sebagai bangsa. Perbedaan pendapat bukan menghadirkan kekuatan dari keberagaman itu tapi sebaliknya malah melemahkan pluralitas kita sebagai yang sudah dari dulu ada.

Defisit demokrasi yang terjadi di Indonesia, selain ketidakmatangan kita dalam berpartisipasi secara rasional di media sosial. Bahwa *cyberdemocracy* ternyata tidak menjamin adanya partisipasi. Ruang publik di media sosial yang diharapkan adalah munculnya partisipasi aktif yang rasional untuk melakukan deliberasi dan melakukan diskursus. Kenyataannya ruang-ruang tersebut dikuasai oleh para elit yang pragmatis bahkan menggunakan *buzzer* untuk mendistorsi atau mengaburkan informasi fakta menjadi kabar bohong yang berpengaruh untuk menggoyangkan stabilitas politik negara. Dampaknya perilaku partisipasi masyarakat ini yang irasional ini atau kita sebut simptom memburamkan esensi demokrasi itu sendiri.

Defisit demokrasi ini juga ditandai dengan berkembangnya Pasca-kebenaran di media. Istilah Pasca-kebenaran ini ketika fenomena media sosial sekarang yang penuh dengan ujaran kebencian dan penyebaran informasi palsu (hoax). Padahal informasi yang ada di media sosial itu, terkadang bukan mendekatkan kita terhadap suatu fakta, melainkan menjauhkan kita dari fakta yang ada. Indonesia merupakan salah satu negara terbanyak dalam mengakases media sosial seperti Facebook dan Twitter. Hal itu sebenarnya menjadi suatu indikasi yang baik bila digunakan secara baik akan hasilnya sangat positif. Akan tetapi, kalau penggunaan internet itu tidak didukung dengan literasi yang baik, bisa jadi mendapatkan informasi-informasi 'menyesatkan'.

Indonesia yang dikenal sebagai masyarakat yang plural baik perbedaan budaya, agama, etnis dan suku mampu menyuburkan tumbuhnya fenomena post truth ini dan mengancam jalannya demokrasi kita. Alasannya adalah jika kemunculan post truth ini dibiarkan maka meningkatkan sentimen dan kecurigaan pada masing-masing individu terutama di ranah cyberdemokrasi. Anggapan mereka tidak ada yang dipercaya, dan menjadi kronis ketika membawa isu-isu sensitif demi kepentingan elit politik tertentu dan ditambahnya dari penyebaran berita-berita kebencian dan hoax tersebut oleh oknum-oknum yang kurang informasi dan literasi. Situasi ini akhirnya mempersulit ruang deliberasi yang diwacanakan oleh Jürgen Habermas.

Bahkan situasi politik di Indonesia saat Pilkada 2017 kemarin, banyak aktor politik yang menggunakan situasi pasca-kebenaran dengan mengeksploitasi keresahan dan kegeraman itu dengan menciptakan kebohongan yang semakin menguatkan prasangka warga antara islam dan non islam, pribumi dan nonpribumi, pemerintah vs rakyat. Inilah cara kerja utama politik pasca-kebenaran, yang tidak hanya melibatkan kebohongan tapi juga memanfaatkan sentimen yang telah ada sebelumnya. Oleh karenanya problem masyarakat sipil dalam konteks masyarakat informasi dan demokrasi siber bukan kelangkaan informasi, tapi terjadi *tsunami* informasi berlebih menjadi gejala masyarakat yang sakit, susah untuk menilai mana yang bisa dipercaya dan tidak.

Kita tidak mungkin ingin kembali ke abad kegelapan, dimana kekuatan-kekuatan otoritas kala itu mengkungungkan keberanian kita untuk berpikir. Apakah yang terjadi di Indonesia hari ini? Ketika rezim orde baru menutup rapat-rapat kran berpendapat kita sebagai pemerintahan yang otoriter. Kini demokratisasi yang kita jalankan setelah reformasi seolah-olah menutup mimpi cita-cita demokrasi itu sendiri akibat hasil euforia yang kelewatan.

Simpul Alternatif

Sementara simpulan tulisan ini menyatakan bahwa negara ini belum memiliki cukup prasyarat atau modal untuk bisa menyediakan ruang publik yang memadai. Menyimak dari institusi baik media massa maupun new media seperti media sosial yang ada saja, demokrasi siber juga diduga menjadi strategi digital elit politik yang ingin berkuasa dengan dalil dalil demokrasi.

Dari paparan di atas baik defisit demokrasi dan pasca-kebenaran di era cyberdemocracy ini dapat kita pahami bahwa kebebasan berpendapat di media sosial yang selalu di elu-elukan terjadinya reduksi nilai atas esensi dari demokrasi itu. Bahkan bisa jadi media yang dianggap sebagai revolusi partisipasi demokratis itu tidak terwujud karena secara empiris tidak adanya ruang deliberasi. Bahwa media baru tersebut telah sukses mengalihkan energy untuk berproses pada partisipasi demokratis masyarakat bukan ke arah proses-proses demokratis kongkrit dalam ruang ruang yang faktual, melainkan ke arah repetisi ritual-ritual komunikasi di medan media baru tersebut. Konsekuensi yang ditimbulkan pula terjadi polarisasi masyarakat dalam ranah virtual tadi mulai dari *echo chambers* dan *confirmatory bias*. Ini dikarenakan pemenuhan hasratlah yang menjadi utama, ketimbang tindakan partisipasi tersebut. Untuk memperoleh hasrat ini, subyek tidak perlu benar-benar berpartisipasi, ia cukup hanya perlu merasakan sensasi berpartisipasi dalam memperjuangkan demokrasi.

Jika masalah ini terus berlanjut maka konsep general will yang dibayangkan Rosseau, mungkin dibayangkan susah, paling tidak terdapat imajinasi kolektif sebagai bangsa. Kita harus membayangkan itu walaupun will nya berbeda-beda, tapi kita ini sebagai suatu collective agent yang dalam bahasa pancasila kita itu berada di Bhinneka Tunggal Ika, kita lahir yang berbeda-beda tapi kita harus mampu menemukan ketunggalan itu. Ketunggalan itu dalam operasional kita bisa bayangkan dengan konsep general will nya Rosseau atau bisa dengan *imagine community* nya Ben Anderson.

Ketika ketidaksadaran kita sebagai bangsa, dan mementingkan ego kita masing-masing dengan berlindung atas individual right tadi maka kewajiban kita menjaga negara dan cita-cita menjalankan nilai-nilai demokrasi yang luhur di negara pancasila ini akan tetap menjadi khayalan. Oleh karenanya hadirnya ruang baru publik di media sosial yang seyogyanya meng enlightment dan membuka pintu partisipasi yang rasional sekaligus mengawasi jalannya politik dan pemerintahan yang dalam terminologi Imanuelle Kant sebagai manusia yang berpikir dan tidak ingin kembali ke era kegelapan politik.

Referensi

Barber, Benjamin. (1990). *Strong Democracy: Participatory Politics for a New Age*. Berkeley, Los Angeles, London: University of California Press.

Castells, Manuel, (1997). “Informational Politics and the Crisis of Democracy” dalam *The Power of Identity*, Oxford: Blackwell Publisher.

Freud, Sigmund. (1953). *The Standard Edition of the Complete Psychological Works of Sigmund Freud*, vol. 14 London: Hogarth Press

Habermas, Jurgen. (1989). *The Structural Transformation of the Public Sphere, An Inquiry into a Category of Bourgeois*

Jenkins, Henry and David Thorburn, ed., (2004), *Democracy and New Media*, Cambridge: MIT Press,

Lacan, Jacques, (1977), *Écrits: A selection*, London: Tavistock

Servaes, Jan, (2003), *Communication for development and social change: (UNESCO)*, 7, place de Fontenoy, France,

Jean-Jacques Rousseau (Terj), 2010. *Kontrak Sosial: Prinsip Hukum Politik*. Hidayat. Jakarta: PT. Dian Rakyat.

Lacan, (1993), *Discourse, and Social Change: A Psychoanalytic Cultural Criticism*, Ithaca & London: Cornell Uni Press.

Rousseau dalam Deliar Noer, Noer, Deliar. (1982). *Pemikiran Politik di Negara Barat*. Jakarta: CV. Rajawali

Suhelmi, Ahmad. (2007). *Pemikiran Politik Barat: Kajian Sejarah Perkembangan Pemikiran Negara, Masyarakat dan kekuasaan*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.

Zubaedi, dkk. 2010. *Filsafat Barat*, Yogyakarta: Ar-ruzz media

Referensi Lain

Andrey Miroshnichenko. 2017. “The post-truth world: how social media destroy the absolutism of the “objective” truth”, *Human as Media*, <https://human-as-media.com/2017/02/22/the-post-truth-world-how-social-media-destroy-the-absolutism-of-the-objective-truth/>.

Nayef Al-Rodhan. 2017. “Post-truth Politics, the Fifth Estate, and the Securitization of Fake News”, *Global Policy Journal*, <http://www.globalpolicyjournal.com/blog/07/06/2017/post-truth-politics-fifth-estate-and-securitization-fake-news>; William Davies. 2016. *The Age of Post-Truth Politics*, *New York Times*, <https://www.nytimes.com/2016/08/24/opinion/campaign-stops/the-age-of-post-truth-politics.html?mcubz=3>.

Grace Russo Bullaro. 2017. "Donald Trump and the Era of Post-Truth", <http://www.lavocedineyork.com/en/news/2017/05/18/donald-trump-and-the-era-of-post-truth/>.

Paul Cho. 2017. "Technology and Its Role in the Post-Truth World", <http://www.foxhedgehog.com/2017/03/technology-and-its-role-in-the-post-truth-world/>.

Cora Pfaffert. 2017. "Post-Truth Convenient Lies," <http://www.zocalopublicsquare.org/2017/01/09/post-truth-convenient-lie/ideas/nexus/>.

"Lessons from the Year of Post-Truth Politics," *The Star*, December 27, 2017, <https://www.thestar.com/opinion/editorials/2016/12/27/lessons-from-the-year-of-post-truth-politics-editorial.html>.

Christopher Wilson. "Digital Media in the Egyptian Revolution: Descriptive Analysis from the Tahrir Data Sets." *International Journal of Communication*, Vol. 5(2011): 1248-122; Anne Alexander and Miriyam Aouragh. "Egypt's Unfinished Revolution: The Role of the Media Revisited." *International Journal of Communication*, Vol. 8 (2014): 890–915.

Xueqing Li, Francis L.F. Lee, and Ying Li. "The Dual Impact of Social Media Under Networked Authoritarianism: Social Media Use, Civic Attitudes, and System Support in China." *International Journal of Communication*, Vol. 10(2016): 5143–5163.

Sylvia A. Owiny, Khanjan Mehta, and Audrey N. Maretzki. "The Use of Social Media Technologies to Create, Preserve, and Disseminate Indigenous Knowledge and Skills to Communities in East Africa." *International Journal of Communication*, Vol. 8(2014): 234-247.

Maggie Walter. "Market Forces and Indigenous Resistance Paradigms", *Social Movement Studies*, Vol. 9(2), 2010: 121-137; Njoki Nathani Wane. "Indigenous Education and Cultural Resistance: A Decolonizing Project." *Curriculum Inquiry*, Vol. 39(1), 2009: 159-178; Rima Wilkes. "The Protest Actions of Indigenous Peoples: A Canadian-U.S. Comparison of Social Movement Emergence." *American Behavioral Scientist*, Vol. 50(4), 2006: 510-525; Janice Windborne. "New Laws, Old Values: Indigenous Resistance to Children's Rights in Ghana." *Atlantic Journal of Communication*, Vol. 14(3), 2006: 156–172; Anne Marie Todd. "Environmental Sovereignty Discourse of the Brazilian Amazon: National Politics and the Globalization of Indigenous Resistance." *Journal of Communication Inquiry*, Vol. 27(4), 2003: 354-370.